



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);

11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
23. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 10).
24. Peraturan Walikota Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pemberian Biaya Jasa Pelayanan/ Honorarium Bagi Warga Pelayan Masyarakat di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT DI KOTA SURABAYA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Dinas Kesehatan, selanjutnya disebut dengan Dinas, adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya.
5. Kepala Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Surabaya.

6. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
8. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya.
12. Kader Surabaya Hebat yang selanjutnya disingkat KSH adalah warga pelayan masyarakat yang ditetapkan oleh Camat.
13. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
14. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
15. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
16. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
17. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

18. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.
19. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
20. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
21. Kelurahan STBM adalah Kelurahan yang masyarakatnya telah menjalankan 5 Pilar STBM yaitu masyarakatnya telah Stop Buang Air Besar Sembarangan, berperilaku Cuci Tangan Pakai Sabun, mengelola Air Minum dan Makanan Rumah Tangga dengan aman, mengelola sampah air dan limbah rumah tangga dengan aman.
22. Penciptaan lingkungan yang kondusif merupakan upaya menciptakan kondisi mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, instansi pendidikan, institusi keagamaan dan swasta.
23. Peningkatan kebutuhan sanitasi merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
24. Peningkatan penyediaan akses sanitasi merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
25. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk untuk memastikan bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam hal penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Daerah.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

## BAB III PENYELENGGARAAN

### Pasal 3

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada 5 Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan;
  - b. Cuci Tangan Pakai Sabun;
  - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
  - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga;
  - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

### Pasal 4

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan;
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standard persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:

- a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
- a. melakukan pemilahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat dan membentuk kelompok serta membuat rencana kerja sesuai kebutuhan.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, KSH, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.



- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah dilakukan Pemicuan diberikan pendampingan oleh tenaga kesehatan, kader, dan/atau relawan dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat.

#### BAB IV VERIFIKASI STBM

##### Pasal 6

- (1) Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku masyarakat dalam penyelenggaraan STBM 5 (lima) pilar.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat Kelurahan atau Kecamatan yang telah berhasil mencapai STBM 5 (lima) pilar.

##### Pasal 7

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Tim Verifikasi STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris : Kepala Puskesmas
  - c. Anggota : 1. Kecamatan;  
2. Kelurahan;  
3. Pusat Kesehatan Masyarakat;  
4. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;  
5. Tokoh Masyarakat;  
6. KSH.
- (3) Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Camat.
- (4) Tim Verifikasi STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua : Lurah
  - b. Sekretaris : Kepala Puskesmas
  - c. Anggota : 1. Kelurahan;  
2. Pusat Kesehatan Masyarakat;  
3. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

4. Tokoh Masyarakat;
5. KSH.

- (5) Tim Verifikasi STBM tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Lurah.

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan cara wawancara, observasi lapangan, analisa hasil laporan, dan diskusi tentang 5 (lima) pilar STBM.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Lurah.
- (3) Setelah diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan yang telah lolos verifikasi dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.

### BAB V PENGHARGAAN

#### Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan bagi Kelurahan yang telah berhasil menyelenggarakan 5 (lima) pilar STBM.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk piagam.

### BAB VI PEMBENTUKAN TIM FASILITATOR

#### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan penyelenggaraan STBM, dibentuk Tim Fasilitator.
- (2) Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Tim Fasilitator STBM Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
  - b. Tim Fasilitator STBM Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kelurahan.
- (3) Tim Fasilitator STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.

### BAB VII PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 11

- (1) Tim Fasilitator STBM Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menyusun rencana Kecamatan dalam mencapai Kecamatan STBM;
  - b. berkoordinasi dengan berbagai lapisan institusi Pemerintah di Kecamatan dan memberi dukungan bagi KSH pemicu STBM;
  - c. mengembangkan pengusaha lokal untuk memproduksi dan suplay bahan serta memonitor kualitas bahan;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi dari Tim STBM Kelurahan;
  - e. memelihara basis data status kesehatan yang efektif dan terbaru secara berkala;
  - f. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kecamatan kepada Tim STBM Kota;
  - g. membuat kebijakan tingkat Kecamatan terkait STBM.
- (2) Tim Fasilitator STBM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana Kelurahan dalam mencapai Kelurahan STBM;
  - b. membuat kebijakan tingkat Kelurahan terkait STBM;
  - c. melakukan pemicuan perubahan perilaku;
  - d. memonitor kerja KSH pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan;
  - e. melaporkan perkembangan kegiatan Tim STBM Kelurahan kepada Tim STBM Kecamatan.

## Pasal 12

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Kelurahan dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan STBM dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

## Pasal 14

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diarahakan kepada:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM;
- c. capaian Kelurahan STBM; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB IX  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

## Pasal 15

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
  - a. Aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. Keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. Permasalahan yang dihadapi;
  - d. Dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di tingkat Kota dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di tingkat Kecamatan dilakukan oleh tenaga kesehatan Puskesmas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi terhadap indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) di tingkat Kelurahan dilakukan oleh fasilitator STBM yang ditunjuk oleh Ketua Tim Fasilitator tingkat Kelurahan.

BAB X  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan Penyelenggaraan STBM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Masyarakat; dan/atau
- c. Pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Juli 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 31 Juli 2023

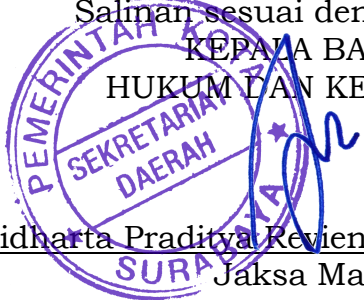
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.  
Jaksa Madya  
NIP. 19780307 200501 1 004